



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. SOLEHUDDIN
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 237187

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **4.356.462.500**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.987.500
2. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m2/50 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 676.725.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 1.204.687.500
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 794.062.500
5. Tanah Seluas 742 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/73 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **190.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5S CVT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **190.340.000**



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | ---- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 722.992.377 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 5.460.294.877 |
| III. HUTANG | Rp. | 500.018.580 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 4.960.276.297 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.